



KEMENTERIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL



2022

Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan

Kementrian
Keuangan RI

Rencana Strategi Bisnis 2020 - 2024

Revisi Kedua



www.lpdp.kemenkeu.go.id

Gedung Danadyaksa
Jl. Cikini Raya No.91A-D
Jakarta Pusat 10330
☎ 1500652



Jakarta,

2022

**RENCANA STRATEGI BISNIS 2020-2024
REVISI KEDUA**

**DISAHKAN,
PIMPINAN/PEJABAT PENGELOLA BLU**

Pit. Direktur Utama
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan,

Andin Hadiyanto



Jakarta,

2022

RENCANA STRATEGI BISNIS 2020-2024

REVISI KEDUA

**DIKETAHUI,
DEWAN PENGAWAS**

Ketua merangkap Anggota,

Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M

Anggota,

Ir. Suharti, M.A., Ph.D

Anggota,

Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag

Anggota,

Nur Tri Aries Suestiningtyas, M.A

Anggota,

Prof. Dr. Lincoln Arsyad, M.Sc

Kata Pengantar



Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja pada Kementerian Keuangan R.I. yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK BLU. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 menetapkan LPDP untuk mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dialokasikan dari APBN.

Sesuai PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pemimpin BLU dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. LPDP sebagai BLU telah memiliki Rencana Strategis Bisnis 2020-2024 yang mencakup pengelolaan Dana Abadi Pendidikan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, LPDP juga memperoleh mandat untuk mengelola tidak hanya Dana Abadi Pendidikan namun tiga dana abadi lainnya yaitu Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Untuk itu, LPDP menyusun revisi Rencana Strategis Bisnis LPDP tahun 2020-2024 ini yang memasukkan rencana pengelolaan dan penyaluran seluruh Dana Abadi di Bidang Pendidikan mulai akhir tahun 2021.

Diharapkan di masa mendatang LPDP dapat meningkatkan kinerja dan layanan dalam penyaluran dana beasiswa dan pendanaan riset melalui pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang professional, transparan, dan optimal.

Jakarta, November 2022
Plt. Direktur Utama,

Andin Hadiyanto

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Renstra Kementerian Keuangan	2
B. Profil Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	2
B.1. Visi dan Misi	2
B.2. Tugas dan Fungsi	3
B.3. Layanan	3
B.3.1. Layanan Pengembangan Dana	3
B.3.2. Layanan Penyaluran Dana	3
B.4. Organisasi	4
C. Target Penyusunan RSB	5
BAB II ANALISIS DAN STRATEGI	9
A. EVALUASI KINERJA LPDP	10
B. ANALISIS	12
B.1. ANALISIS KONDISI PENDIDIKAN	12
B.2. ANALISIS PERKEMBANGAN RISET	13
B.3. ANALISIS EKONOMI MAKRO	13
B.4. PESTEL ANALISIS	14
B.5. SWOT Analysis	14
B.6. INISIATIF STRATEGIS 2022	16
BAB III RENSTRA BISNIS 2020-2024	18
A. PROGRAM K/L	19
B. STRATEGIS BISNIS LPDP	19
B.1. INISIATIF STRATEGIS JANGKA PENDEK	19
B.2. INISIATIF STRATEGIS JANGKA MENENGAH	19
C. KEGIATAN DAN INDIKATOR UNIT KERJA LPDP	19
C.1. Unit Layanan	20
D. RENCANA STRATEGIS BISNIS	21
BAB IV PENUTUP	29
DAFTAR PUSTAKA	30

1

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

A. RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN

Pandemi COVID-19 menjadi perhatian utama dari Kementerian Keuangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Dengan adanya pandemi COVID-19 memberikan dampaknya pada sektor perekonomian global dan Indonesia, sehingga diperlukan respons serta antisipasi terhadap dampak-dampak yang timbul tersebut. Penyusunan rencana strategis Kementerian Keuangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dalam rangka tindak lanjut terhadap ditetapkan Perppu 1 Tahun 2020. Fokus utama dari penyusunan rencana strategis tersebut sebagai langkah dalam mengantisipasi berbagai dampak dari COVID-19 terhadap aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian, serta sebagai upaya untuk mencapai *recovery* perekonomian nasional periode tahun 2020-2024.

Merujuk pada PMK Nomor 77/PMK/01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa kebijakan Kementerian Keuangan memiliki salah satu fokus untuk Mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Lebih Efisien dan Efektif serta Memberi Manfaat Finansial. Sebagai upaya implementasi fokus tersebut, salah satu strategi pelaksanaannya adalah dengan melakukan Peningkatan Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasi *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan melalui peningkatan tata kelola dan regulasi untuk mencapai *recovery* sosial ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi nasional. LPDP sebagai salah satu lembaga SMV Kementerian Keuangan akan melaksanakan strategi tersebut sesuai PMK Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

B. PROFIL LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

B.1. Visi dan Misi

LPDP sebagai satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum berdasarkan ketetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan. Dengan penetapan tersebut, LPDP memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Badan Layanan Umum. LPDP memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan DPPN, baik Dana Abadi Pendidikan (*Endowment Fund*) maupun Dana Cadangan Pendidikan.

Sebagai satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum, LPDP memiliki visi “Menjadi Lembaga pengelola dana bertaraf Internasional guna menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan” untuk mencapai visi tersebut, LPDP memiliki misi:

1. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan.
2. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.
3. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal.

B.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMK nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan. LPDP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan di bidang investasi;
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan beasiswa;
3. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan fasilitasi pendanaan riset;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
5. Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Lembaga pengelola Dana Pendidikan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

B. 3. Layanan

Layanan LPDP adalah melaksanakan pengembangan dana dan penyaluran hasil pengembangan dana untuk layanan beasiswa dan pendanaan riset. DPPN yang diterima dari APBN dikelola LPDP sebagai dana abadi pendidikan. LPDP mengembangkan DPPN tersebut dengan melaksanakan investasi dalam berbagai instrumen investasi. PNBPN dari hasil pengembangan dana tersebut, digunakan untuk pelaksanaan layanan beasiswa, pendanaan riset, dan untuk biaya operasional.

B.3.1. Layanan Pengembangan Dana

Pengembangan dana LPDP dilaksanakan melalui:

1. Pengelolaan Dana Abadi Bidang Pendidikan melalui pengembangan dana dengan melaksanakan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (expected return).
2. Pengelolaan sumber pendanaan lain di luar APBN seperti hibah, hasil kerjasama dengan masyarakat, perusahaan, optimalisasi hasil komersialisasi hasil riset dan hasil usaha lainnya.

Ke depannya LPDP diharapkan tidak hanya melaksanakan investasi pada deposito dan surat utang negara, tetapi juga pada instrumen yang lebih beragam dan menggali sumber dana non-APBN, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana dari APBN.

B.3.2. Layanan Penyaluran Dana

Dalam Layanan Penyaluran Dana, dana yang disalurkan merupakan hasil dari pengembangan dana atau PNBPN. Dana ini dipakai untuk membiayai beasiswa dan pendanaan riset.

1. Beasiswa

Layanan Beasiswa LPDP mengalami pengembangan di tahun 2022. Mulai tahun 2022 layanan Beasiswa LPDP tidak hanya akan berada dalam

pengelolaan LPDP saja, namun sebagian akan merupakan program kolaborasi, misalnya LPDP, Kemdikbudristek, dan Kementerian Agama.

2. Pendanaan Riset

Pendanaan riset LPDP yang disebut dengan program Riset Inovatif dan Produktif (RISPRO) adalah program pendanaan riset unggulan yang diarahkan pada komersialisasi/implementasi hasil riset sehingga diharapkan dapat memberi nilai tambah dan/atau inovasi.

3. Pendanaan Kegiatan Kebudayaan

Pendanaan kegiatan kebudayaan dilakukan pengelolaannya oleh Ditjen Kebudayaan. Pendanaan program ini menggunakan dana abadi kebudayaan.

4. Pendanaan Kegiatan Perguruan Tinggi

Pendanaan kegiatan program perguruan tinggi dilakukan pengelolaannya oleh Ditjen Dikti dan perguruan tinggi untuk meningkatkan peringkat kampus menuju *world class university*. Pendanaan program ini menggunakan dana abadi penelitian.

B. 4. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan di bidang investasi;
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan beasiswa;
3. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan fasilitasi pendanaan riset;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
5. Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas:

1. Direktorat Keuangan dan Umum;
2. Direktorat Investasi;
3. Direktorat Beasiswa;
4. Direktorat Fasilitasi Riset; dan
5. Satuan Pemeriksaan Intern.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana abadi, di luar struktur tersebut LPDP dilengkapi dengan Dewan Penyalur dan Dewan Pengawas. Dewan Penyalur bertugas memberikan arahan kebijakan strategis dalam pengelolaan Dana Abadi Pendidikan. Sedangkan Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap:

1. Pengelolaan dana abadi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (Renstra) yang dilakukan oleh Direksi;
3. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) oleh Direksi; dan

4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

C. TARGET PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

Sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden No 111 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, disebutkan bahwa penggunaan Dana Abadi Pendidikan digunakan untuk program layanan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi.

Program 4 jenis Dana Abadi:

1. Dana Abadi Pendidikan

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas Dana Abadi Pendidikan dengan meningkatkan dana abadi (*endowment fund*) serta memperbesar manfaatnya di masa yang akan datang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa dalam dua dekade ke depan, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yaitu tingginya jumlah usia angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai sekitar 70%, sedangkan jika dibandingkan dengan penduduk nonproduktif (usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun) sekitar 30%.

LPDP diharapkan dapat mengelola dana tersebut melalui berbagai skema kebijakan investasi yang menguntungkan dan hasilnya dapat digunakan lebih banyak lagi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan program pendidikan. Kebutuhan dana sekitar Rp400 triliun sebagai *endowment fund* digunakan untuk mendukung penyiapan SDM berkualitas di berbagai bidang pembangunan hingga tahun 2030. Pada tahun 2022, posisi Dana Abadi Pendidikan dan dana kelolaan diproyeksikan sebagai berikut:

Perkembangan Dana Abadi Pendidikan

(dalam milyar rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Akumulasi Dana Kelolaan	51.117,70	61.117,70	81.117,70
Tambahan DA Pendidikan	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Akumulasi DPPN	61.117,70	81.117,70	101.117,70

Berdasarkan peraturan Presiden No 111 Tahun 2021 disebutkan bahwa penggunaan Dana Abadi Pendidikan digunakan untuk:

1. Beasiswa Gelar dan Non Gelar
2. Peningkatan Kompetensi Gelar dan Non Gelar
3. Pendanaan Riset
4. Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Pesantren.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren disebutkan bahwa Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPDP akan mengelola Dana Abadi Pesantren yang secara khusus akan dialokasikan pada tahun 2023.

2. Dana Abadi Penelitian

Dalam rangka mencapai visi pembangunan pada tahun 2045, Pemerintah telah menetapkan 4 Pilar Pembangunan Tahun 2045 sebagai berikut: 1) Pembangunan Manusia dan Penguasaan Iptek; 2) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; 3) Pemerataan Pembangunan; dan 4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Salah satu sasaran pembangunan terkait manusia dan iptek adalah terjadinya peningkatan dalam pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi untuk menghasilkan produk inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh industri. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan dan peningkatan dalam penguasaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan.

LPDP diharapkan dapat mengelola dana abadi penelitian melalui berbagai skema kebijakan investasi yang menguntungkan dan hasilnya dapat digunakan lebih banyak lagi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan program pendidikan. Pada tahun 2022, posisi Dana Abadi Penelitian diproyeksikan sebagai berikut:

Perkembangan Dana Abadi Penelitian

(dalam milyar rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Akumulasi Dana Kelolaan	0	4.990,00	7.990,00
Tambahan DA Penelitian	4.990,00	3.000,00	0
Akumulasi DPPN	4.990,00	7.990,00	7.990,00

Berdasarkan peraturan Presiden No 111 Tahun 2021 disebutkan bahwa penggunaan Dana Abadi Penelitian digunakan untuk program layanan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan inovasi dan inovasi.

3. Dana Abadi Perguruan Tinggi

Program Dana Abadi Perguruan Tinggi merupakan program pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkolaborasi dengan insan perguruan tinggi serta Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI) untuk berkolaborasi dalam membentuk ekosistem Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Setelah perguruan tinggi dan Dunia Usaha Dunia Industri bersepakat dengan kemitraan melalui Kedaireka, dan termasuk juga kesepakatan pendanaan bersama, dosen di perguruan tinggi dapat mengajukan proposal Dana Padanan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LPDP diharapkan dapat mengelola dana abadi perguruan tinggi melalui berbagai skema kebijakan investasi yang menguntungkan dan hasilnya dapat digunakan lebih banyak lagi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan program dana padanan. Pada tahun 2022, posisi Dana Abadi Perguruan Tinggi diproyeksikan sebagai berikut:

Perkembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi

(dalam milyar rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Akumulasi Dana Kelolaan	0	3.000,00	7.000,00
Tambahan DA PT	3.000,00	4.000,00	0
Akumulasi DPPN	4.990,00	7.000,00	7.000,00

Berdasarkan peraturan Presiden No 111 Tahun 2021 disebutkan bahwa penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi digunakan untuk program layanan dana padanan atas hasil pengembangan dana abadi masing-masing perguruan tinggi kelas dunia untuk meningkatkan peringkat perguruan tingginya.

4. Dana Abadi Kebudayaan

Pemerintah menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi berikutnya. Bila mengacu pada Visi Bidang Kebudayaan pada Kemendikbudristek yang berbunyi:

“Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kebudayaan yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Sasaran program layanan dana abadi kebudayaan seyogyanya akan mendukung pencapaian Visi dimaksud. Beberapa program meliputi peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan melalui:

- (1) dukungan keikutsertaan dalam pelatihan dan uji kompetensi;
- (2) dukungan penyelenggaraan workshop, seminar, dan konferensi; serta
- (3) dukungan peningkatan kapasitas dan kesinambungan organisasi.

Selain itu, pemanfaatan hasil kelolaan Dana Abadi Kebudayaan juga akan digunakan untuk memfasilitasi program atau kegiatan dalam kerangka pemajuan kebudayaan dalam ekosistem sepuluh objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, seperti:

- (1) dukungan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan seperti festival, pertunjukan, dan pameran;
- (2) dukungan terhadap riset dan kajian bidang kebudayaan; serta
- (3) dukungan pada produksi karya-karya seni, pengembangan sains, teknologi inovatif, dan engineering bidang kebudayaan.

LPDP diharapkan dapat mengelola dana abadi kebudayaan melalui berbagai skema kebijakan investasi yang menguntungkan dan hasilnya dapat digunakan lebih banyak lagi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan program dana kebudayaan. Pada tahun 2022, posisi Dana Abadi Kebudayaan diproyeksikan sebagai berikut:

Perkembangan Dana Abadi Kebudayaan

(dalam milyar rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Akumulasi Dana Kelolaan	0	1.000,00	3.000,00
Tambahan DA Kebudayaan	1.000,00	2.000,00	0
Akumulasi DPPN	1.000,00	3.000,00	3.000,00

Berdasarkan peraturan Presiden No 111 Tahun 2021 disebutkan bahwa penggunaan Dana Abadi Pendidikan digunakan untuk:

- a) Fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya
- b) Produksi kegiatan kebudayaan
- c) Produksi media
- d) program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun

Revisi RSB ini disusun agar LPDP dapat menyesuaikan tugas dan fungsi lembaga untuk melaksanakan amanat Perpres dimaksud, sehingga diperlukan dokumen rencana strategi bisnis yang lebih komprehensif dan terukur sesuai dengan masing-masing unit kerja dalam organisasi LPDP mencakup unit layanan, unit SDM, unit Keuangan, unit Sarana dan Prasarana dan Unit Investasi yang akan menjadi acuan program kerja LPDP tahun 2022-2024.

2

Analisis dan Strategi



BAB II

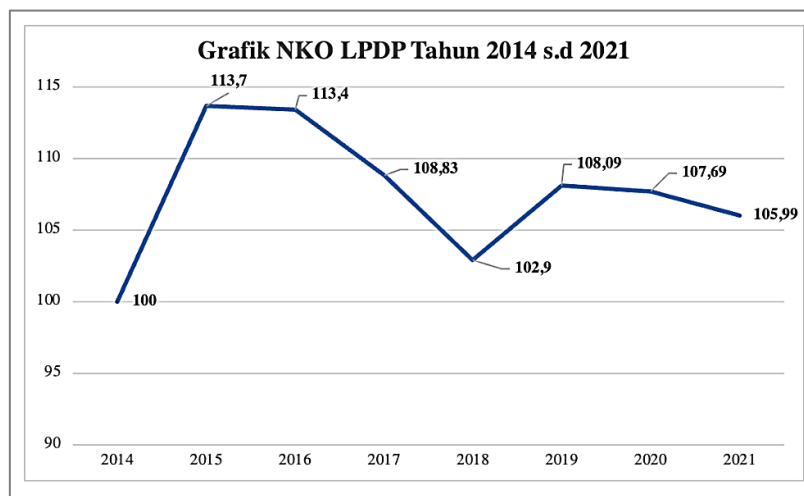
ANALISIS DAN STRATEGI

A. EVALUASI KINERJA LPDP

LPDP telah menetapkan 7 sasaran strategis (SS) melalui Kontrak Kinerja tahun 2021 yang meliputi:

1. 1 (satu) SS termasuk dalam *Stakeholder Perspective*;
2. 1 (satu) SS termasuk dalam *Customer Perspective*;
3. 2 (dua) SS termasuk dalam *Internal Process Perspective*; dan
4. 3 (tiga) SS termasuk dalam *Learning and Growth Perspective*.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja LPDP tahun 2021, indeks nilai kinerja organisasi LPDP mengalami penurunan 2,1 poin dari tahun 2020 di angka 108,9 menjadi 105,99 di tahun 2021.



Adapun rincian masing-masing evaluasi kinerja dari tiap persepektif BSC LPDP dapat dilihat dari tabel berikut:

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	25%	112,50
Customer	15%	101,93
Internal Process	30%	106,14
Learning & Growth	30%	102,43
Nilai Kinerja Organisasi		105,99

Catatan status NKO:

- $100 \leq X \leq 120$ = memenuhi ekspektasi
 $80 \leq X < 100$ = belum memenuhi ekspektasi
 $X < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

Meskipun terjadi penurunan NKO dari tahun sebelumnya, secara umum IKU LPDP masih diatas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2021. Kenaikan nilai kinerja yang cukup signifikan terdapat pada IKU 1a-N terkait Indeks Kepuasan Stakeholder dimana

Berikut adalah tabel rincian pencapaian 7 Sasaran Strategis beserta IKU LPDP pada nilai kinerja organisasi LPDP tahun 2021:

Capaian IKU LPDP Tahun 2021

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2021	Target Q4	Realisasi	Indeks
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Kredibilitas LPDP yang Tinggi				
1a-N	Indeks Kepuasan Stakeholder	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4,50 (skala 5)	112,5
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Pelayanan Publik yang Prima				
2a-CP	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	4,15 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,23 (skala 5)	101,93
INTERNAL PROCESS BUSINESS PERSPECTIVE					
3	Pengelolaan Investasi dan Layanan yang Andal				
3a-CP	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana	5,50%	5,50%	5,64%	102,55
4	Talenta/Hasil Riset yang Optimal				
4a-CP	Indeks Talenta yang Berkualitas	3,70 (skala 5)	3,70 (skala 5)	3,89 (skala 5)	105,14
4b-CP	Indeks Luaran Riset yang Berkualitas	4,00 (skala 5)	4,00 (skala 5)	4,64 (skala 5)	116,00
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					
5	Organisasi dan Sumber Daya yang Optimal				
5a-CP	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	98,10%	98,10%	100%	101,94
5b-CP	Indeks Persepsi Integritas	90	90	92,05	102,28
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Kredibel dan Akuntabel				
6a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	97,48%	102,07
7	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah				
7a-N	Persentase Rekomendasi Audit/Monev yang Ditindaklanjuti	97%	97%	100%	103,09
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2021					105,99

Penyerapan realisasi belanja LPDP sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 3.078.417.429.867.000 atau sebesar 78% dari total pagu belanja sebesar Rp. 3.943.053.402.000. Rendahnya realisasi belanja program beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbudristek memberikan dampak pada penyerapan realisasi belanja LPDP tahun 2021. Faktor yang menjadi penyebab yaitu rendahnya penyerapan beasiswa kolaborasi antara LPDP dengan Kemendikbudristek yang tercatat hanya menyerap Rp. 838 milyar, dari total pagu yang disediakan sebesar Rp. 1.546 milyar. Selama terbentuknya LPDP, sampai dengan 31 Desember 2021, penyaluran dana beasiswa pendidikan telah mencapai 29.872 orang.

Ketentuan Pasal 2 Perpres 111/2021 membagi Dana Abadi di Bidang Pendidikan menjadi Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Sumber-sumber Dana Abadi di Bidang Pendidikan antara lain dari:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara;

2. Pendapatan investasi; dan/atau
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Total *Asset Under Management* (AUM) LPDP per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp104.118.033.806.957 yang terdiri dari saldo Dana Abadi sebesar Rp99.107.700.000.000 dan saldo kas/surplus PNBPN sebesar Rp5.010.333.806.957. Dari surplus tersebut, sebesar Rp4.978.676.379.921 diinvestasikan dalam Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek berupa deposito dalam rangka manajemen kas. Rincian AUM LPDP per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SUMBER DANA	POKOK DANA ABADI	PNBP		TOTAL	%
			REINVESTASI	KAS		
1	DA Pendidikan	81,117,700,000,000	4,662,509,926,051	31,180,557,691	85,811,390,483,742	82.42%
2	DA Penelitian	7,990,000,000,000	175,490,469,383	274,732,114	8,165,765,201,497	7.84%
3	DA Perguruan Tinggi	7,000,000,000,000	105,575,179,933	88,834,343	7,105,664,014,276	6.82%
4	DA Kebudayaan	3,000,000,000,000	35,100,804,554	113,302,889	3,035,214,107,443	2.92%
TOTAL AUM		99,107,700,000,000	4,978,676,379,921	31,657,427,036	104,118,033,806,957	100.00%
PERSENTASE		95.19%	4.78%	0.03%	100.00%	

B. ANALISIS

B.1. Analisis Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Indonesia menjadi salah satu Prioritas Nasional ketiga Pemerintah Indonesia di dalam RPJMN 2020-2024 dalam rangka meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Salah satu penjabarannya di dalam Prioritas Pemerintah adalah berupa Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas. Visi Kemendikbudristek yang berbunyi:

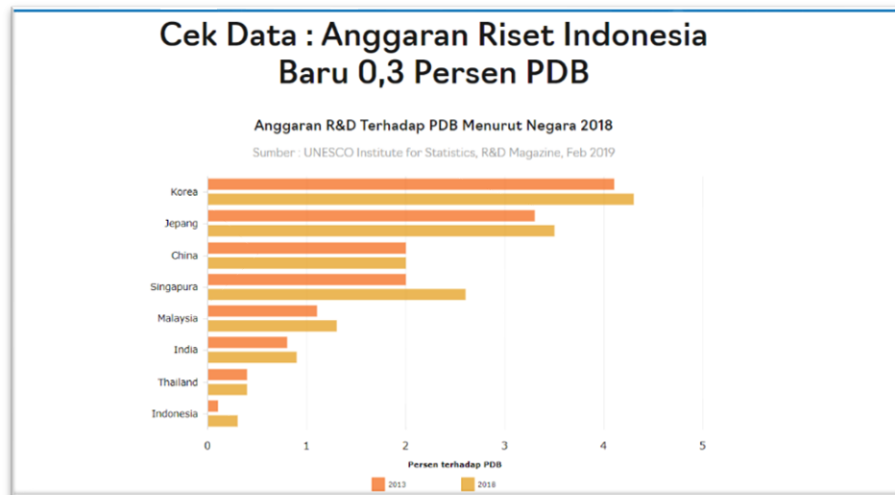
“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”,

menjadi acuan dalam menyusun program layanan dana abadi Pendidikan. Disamping itu, sistem pendidikan Indonesia saat ini perlu menyesuaikan dengan kondisi yang disebabkan karena perubahan ekonomi ke arah digital dan green economy; perubahan sosiokultural dan bonus demografi Indonesia; perubahan pasar tenaga kerja akibat revolusi industri 4.0 dan kebutuhan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan 2045. Mengacu pada dokumen Roadmap Pendidikan Nasional tahun 2020-2035, bahwa Visi Pendidikan Indonesia 2035 meliputi “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya”. Program Merdeka Belajar menjadi program strategis dalam rangka mewujudkan SDM Indonesia unggul untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Selain itu, dalam dokumen Peta Jalan Generasi Emas 2045, dinyatakan bahwa arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan Indonesia mengacu pada dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Untuk itu, dalam menyusun revisi ke-2 RSB LPDP 2020-2024 ini, diperlukan suatu kebijakan yang terukur dalam mendukung program layanan beasiswa LPDP serta layanan Dana Abadi Perguruan Tinggi, agar LPDP dapat membuat fondasi yang kuat khususnya dalam pencapaian penguatan SDM Indonesia unggul tahun 2045.

B.2. Analisis Perkembangan Riset

Mengutip data dari publikasi UNESCO for statistics, anggaran riset di Indonesia pada 2018 hanya 0,3 persen terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Alokasi ini lebih kecil dibandingkan beberapa negara lain di Asia. Kendati demikian, antara tahun 2013-2018 anggaran R&D Indonesia tercatat naik hampir 500 persen (katadata, 2019).



Masih minimnya alokasi dana riset dan inovasi menjadi tantangan tersendiri bagi LPDP untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang memiliki daya saing di tingkat global. Laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) menyebutkan Indonesia berada di peringkat 87 dari 132 negara dengan nilai/skor yang terus merosot. Inovasi Indonesia dinilai lemah terutama pada aspek “kelembagaan” (peringkat ke-107). Bila dikomparasi dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih jauh tertinggal dibanding Brunei (ranking 82), Filipina (ranking 51) dan Vietnam (ranking 44). Apalagi dibanding Thailand (ranking 43), Malaysia (ranking 36) dan Singapura (ranking 8). Hanya berada di atas Laos (ranking 117) dan Kamboja (ranking 109).

Pembentukan Badan Riset Inovasi Nasional berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2019, bertujuan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2020-2024 Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan visi sebagai berikut:

“Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

BRIN menjadi mitra utama LPDP dalam konteks pemberian layanan dana abadi riset di Indonesia. Melalui pendanaan RISPRO LPDP, dimana riset-riset yang didanai merupakan riset yang diharapkan menjadi bagian dari industri sehingga dapat berkontribusi langsung kepada perekonomian. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif antara BRIN dan LPDP serta perumusan program dalam membangun “Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Indonesia yang Berdaya Saing”.

B.3. Analisis Ekonomi Makro

Saat ini (per 30 Mei 2022) dampak gelombang ke-3 pandemi Covid-19 di Indonesia sudah sangat melandai. Kasus harian telah berada di kisaran 500 kasus per hari. Pemerintah RI telah membuka level PPKM di berbagai daerah menjadi level 1 dan 2, sehingga geliat pertumbuhan ekonomi semakin pulih. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan rilis asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 berada di kisaran 5-5,5 %. Sedangkan untuk tingkat yield suku bunga SUN 10 tahun berada pada kisaran 6,82 %. LPDP juga harus mencermati asumsi kurs IDR-USD yang diperkirakan berada pada kisaran Rp. 14.350 per USD di tahun 2022, menguat dari asumsi tahun 2021 yang berada pada kisaran Rp. 14.650 per USD. Untuk itu, proyeksi perekonomian Indonesia yang mulai pulih di tahun 2022 diharapkan dapat berlanjut peningkatannya hingga tahun 2023 sehingga mendukung pencapaian target hasil PNPB dan imbal hasil pengembangan DPPN sebesar 5,5% di tahun 2023 tersebut.

B.4. PESTEL Analysis

PESTEL merupakan singkatan dari kategori-kategori faktor lingkungan makro, yaitu *Political, Economic, Social, Technology, Legal, dan Environment*. PESTEL digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi.

Faktor	Analisis
Politik	Konflik Rusia-Ukraina bila berkepanjangan dapat memberikan dampak terhadap risiko implementasi beasiswa mahasiswa LPDP untuk mengikuti program S2/S3 di Luar Negeri
Economic	Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, dari 3,2-4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Namun tingkat suku bunga SUN 10 tahun diprediksi turun 6,82%/tahun di 2022.
Social	Trend perkembangan media sosial dimana terdapat 170 juta pengguna aktif sosial media atau 61,8% dari total populasi Indonesia (wearesocial.com, 2022), perlu menjadi sarana publikasi yang efektif.
Technology	Perkembangan metode MOOCS (pembelajaran asinkronus) yang disediakan provider seperti Edx, Coursera, Udemy, dll, menjadi alternatif dalam peningkatan kompetensi SDM global.
Legal	Regulasi terhadap LPDP sebagai BLU Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan dana abadi dari sumber non APBN perlu di detailkan dan sesuai perundangan yang berlaku.
Environment	Trend ESG Investing, penggunaan Renewable Energy, Environmentalist, menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan dalam mencetak SDM unggul di bidang tersebut.

B.5. SWOT Analysis

Analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah (5 tahun) yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN serta mewujudkan visi dan melaksanakan misi LPDP, disampaikan dalam format SWOT (strength, weakness, opportunity, threat).

Strengths/ Kekuatan

S	<i>Strengths</i>
S.1	Jumlah dana kelolaan yang besar
S.2	Pendapatan yang cukup besar
S.3	Pengelolaan keuangan yang fleksibel
S.4	<i>Network</i> dengan para stakeholder yang kuat
S.5	Kerjasama investasi dengan perbankan yang sudah berjalan dengan baik
S.6	Memiliki dukungan regulasi yang kuat
S.7	Tata kelola LPDP sebagai BLU penuh

Weaknesses/ Kelemahan

W	<i>Weakness</i>
W.1	Investasi hanya pada instrumen dengan return rendah (deposito, surat utang negara (SUN))
W.2	Belum ada kebijakan umum dari Dewan Penyantun untuk investasi jangka panjang dan investasi lainnya
W.3	Sumber dana dari Non APBN masih sangat sedikit
W.4	Belum memiliki standar tata kelola penilaian kelayakan dan manajemen risiko
W.5	Jenis dan skema beasiswa belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan strategis nasional
W.6	Proses bisnis beasiswa yang belum sepenuhnya diterima K/L
W.7	Monitoring dan evaluasi beasiswa yang belum optimal
W.8	Penerima beasiswa masih terkonsentrasi di Indonesia Bagian Barat dan daerah-daerah yang relatif maju
W.9	Penempatan alumni yang belum optimal
W.10	Komersialisasi riset belum berjalan optimal
W.11	Sistem teknologi informasi beasiswa dan riset yang belum terintegrasi
W.12	SDM yang memiliki kompetensi investasi masih sangat kurang
W.13	Jumlah SDM dari profesional non PNS yang kurang
W.14	Belum terintegrasinya Sistem Informasi
W.15	Belum tersedianya gedung kantor dan prasarana yang memadai
W.16	Belum ada masterplan transformasi digitalisasi LPDP
W.17	Belum ada keterlibatan industri dalam pemanfaatan riset tersebut

Opportunities/ Kesempatan

O	<i>Opportunities</i>
O.1	Dukungan politik pemerintah (Kementerian/Lembaga (K/L) /Pemda)
O.2	Banyak orang berpenghasilan menengah-atas, namun berat apabila menanggung biaya study di LN
O.3	Cukup banyak K/L , Pemda, BUMN/lembaga riset yang memerlukan SDM berpendidikan tinggi
O.4	Banyak BUMN yang memerlukan dukungan riset
O.5	Antusiasme universitas mitra, baik di dalam maupun luar negeri
O.6	Kerjasama investasi dengan perbankan yang sudah berjalan dengan baik
O.7	Banyak proyek investasi pemerintah yang memerlukan dukungan pembiayaan

O.8	Kondisi pasar keuangan yang cukup baik
O.9	Potensi kerjasama dengan lembaga investasi BUMN

Threats / Tantangan

T	Threats
T.1	Peraturan yang terkait dengan investasi pemerintah belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas investasi
T.2	Roadmap pengembangan SDM Indonesia sebagai acuan pelaksanaan beasiswa belum ada
T.3	Rendahnya ketersediaan dana riset di Indonesia
T.4	Peraturan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak lagi fleksibel
T.5	Risiko " <i>Brain Drain</i> " LPDP <i>Awardees</i>
T.6	Risiko para " <i>Grant Seeker</i> " untuk Dana Riset
T.7	Banyak orang berpenghasilan menengah-atas, namun berat apabila menanggung biaya study di LN
T.8	Global Innovation Index Indonesia 2021 masih rendah (87 dari 132 negara)
T.9	Global Talent Competition Index Indonesia 2020 menempati ranking 5 di tingkat ASEAN
T.10	Ekosistem riset dan inovasi belum terbangun secara optimal
T.11	Kerjasama dengan K/L/Pemda/BUMN/universitas mitra/perbankan belum optimal

B.6. Inisiatif Strategis 2022

Memperhatikan hasil analisis dari kondisi pendidikan, perkembangan riset, ekonomi makro, PESTEL analisis serta analisis SWOT, maka berbagai inisiatif dan sasaran Strategis di tahun 2022 yang akan dilaksanakan di tahun 2022-2024 meliputi:

No	Inisiatif Strategis berdasarkan S-W
1	Target Pengelolaan Dana Abadi mencapai 100 Triliun
2	Program pengembangan kerjasama kemitraan LPDP pengelolaan layanan yang lebih efisien (universitas, Kementerian/Lembaga lain dll)
3	Optimalisasi pengembangan hasil kelolaan melalui berbagai skenario investasi (<i>shifting</i> , perluasan instrumen investasi, dll)
4	Penyaluran layanan: inisiasi desain sistem pembayaran/penyaluran dana kepada KL teknis dan/atau penerima manfaat yang lebih efisien namun tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
5	Penguatan koordinasi dengan K/L teknis dalam pengelolaan layanan (perencanaan s.d. pertanggungjawaban)
6	Penguatan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi layanan
7	Perluasan kemungkinan sumber dana investasi non APBN melalui inisiasi kerja sama dengan lembaga filantropis.
8	Beasiswa <i>demand sectoral</i> (beasiswa yang disesuaikan dengan kebutuhan sector prioritas pembangunan) misal sektor kesehatan, energi terbarukan, digitalisasi
9	Memperkuat <i>positioning</i> LPDP sebagai sumber pembiayaan riset-riset unggulan

10	Memperkuat peran LPDP sebagai sumber pembiayaan SDM dan pelaku budaya di bidang kebudayaan
----	--

No	Inisiatif Strategis berdasarkan O-T
1	Melakukan transformasi kelembagaan LPDP
2	Menyusun masterplan digitalisasi LPDP (layanan, <i>assessment</i> , data <i>center tracing</i> alumni dan hasil riset)
3	Membangun sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) berdasarkan pasar kerja di sector industri strategis
4	Membangun jaringan dengan K/L lain dan dunia industri dalam membuka peluang kerja bagi alumni LPDP
5	Penyusunan analisis beban kerja sesuai dengan Perpres 111/2021
6	Penyusunan kajian <i>mapping</i> analisis SDM LPDP
7	Penyusunan kajian <i>talent profiling</i> SDM LPDP
8	Menginisiasi kajian Roadmap SDM Indonesia Emas 2045 untuk menjadi target kebutuhan alokasi beasiswa
9	Sosialisasi terkait positioning LPDP dalam penyaluran dana abadi pendidikan sesuai Perpres 111/2021

3

Rencana Strategis Bisnis 2020-2024



BAB III

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020 - 2024

A. PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA

Program Kementerian Keuangan di dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 yang terkait dengan BLU LPDP adalah dalam hal Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus. Berikut adalah sasaran program Kementerian Keuangan yang relevan dengan LPDP:

Uraian	Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal					
	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	96,87	100	100	100	100

B. STRATEGI BISNIS LPDP

Strategi Bisnis LPDP dapat dibagi menjadi strategi jangka pendek (*Quick Wins*) dalam satu tahun anggaran dan Strategi Jangka Menengah (pencapaian dalam 2 sampai 3 tahun atau multi years achievements).

B.1. INISIATIF STRATEGIS JANGKA PENDEK (*QUICK WINS*)

Strategi Bisnis Jangka Pendek termasuk, antara lain menyusun Rencana Strategik dan Masterplans untuk IT, Inovasi dan Transformasi Kelembagaan, Roadmap SDM Indonesia Emas 2045; Memperkuat positioning dan legacy LPDP dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan; Memperkuat kerjasama pentahelix dengan media dan DUDI dalam menegaskan peran sentral LPDP dalam peningkatan kapasitas SDM Indonesia; dl.

B.2. INISIATIF STRATEGIS JANGKA MENENGAH

Strategi Bisnis Jangka Menengah LPDP, antara lain mencakup pembangunan sarana dan prasarana kantor yang mendukung transformasi dan digitalisasi proses kelembagaan; pemenuhan SDM yang kompeten dan profesional; Memperkuat kerjasama dan jaringan internasional dalam mendapatkan akses pendanaan global dari phylanthropy/NGO/Institusi2 Global termasuk CSR2 dari perusahaan-perusahaan multinasional.

C. KEGIATAN DAN INDIKATOR UNIT KERJA LPDP

(dalam Milyar Rupiah)

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
DANA ABADI					
Dana Abadi Pendidikan	61.117	81.117	101.117	121.117	141.117
Dana Abadi Penelitian	4.990	7.990	7.990	12.990	17.990
Dana Abadi Kebudayaan	1.000	3.000	3.000	5.000	8.000
Dana Abadi Perguruan Tinggi	3.000	7.000	7.000	10.000	15.000
PENDAPATAN DANA ABADI					
Pendapatan Dana Abadi Pendidikan	3.92	4.243	4.461,47	4.706,85	4.942,19

Pendapatan Dana Abadi Penelitian	0	175	439,45	463,62	486,80
Pendapatan Dana Abadi Kebudayaan	0	35	165,00	174,08	182,78
Pendapatan Dana Abadi Perguruan Tinggi	0	105	385,00	406,18	426,48
BELANJA DANA ABADI					
Belanja Dana Abadi Pendidikan	2.023	3.943	4.461,02	4.706,38	4.941,69
Belanja Dana Abadi Penelitian	0	0	439,00	463,15	486,30
Belanja Dana Abadi Kebudayaan	0	0	165,00	174,08	182,78
Belanja Dana Abadi Perguruan Tinggi	0	0	385,00	406,18	426,48

C.1. UNIT LAYANAN

a. Pendidikan

1. Membentuk *Project management Office* yang bersifat *adhoc* untuk mengakselerasi koordinasi antara LPDP dengan Kemendikbudristek untuk mendukung pelayanan pendidikan;
2. Melakukan percepatan proses Digitalisasi Pelayanan Pendidikan;
3. Penyusunan sistem insentif dan sosialisasi Sistem Rekrutment Beasiswa;
4. Mempersiapkan data center Dana Abadi Pendidikan, manajemen *Big Data* dan *Big Data Analytic* dalam dashboard pimpinan LPDP yang menjadi bagian dari infrastruktur *Decision Support System* LPDP.

b. Riset

1. *Project Management Office* yang bersifat *adhoc* untuk pelayanan dan pembangunan Ekosistem Riset dan Inovasi;
2. *Project Management Office* untuk Komersialisasi dan Hilirisasi Hasil Riset;
3. Penyusunan Model Seleksi Riset sebagai metode pemilihan hasil riset secara obyektif dan menjadi bagian dari instrumen investasi Dana Riset yang efektif;
4. Memulai kompetisi riset unggulan bekerjasama dengan Kemdikbudristek dan BRIN untuk bidang-bidang teknologi baru dan teknologi terapan;
5. Mempersiapkan *data center* Dana Abadi Riset, manajemen *Big Data* dan *Big Data Analytic* untuk menjadi dashboard pimpinan LPDP yang menjadi bagian dari infrastruktur *Decision Support System* LPDP.

c. Perguruan Tinggi

1. Menyusun *Project Management Office* bersifat *adhoc* untuk pelayanan Dana Perguruan Tinggi dan bekerjasama dengan Dunia Usahan dan Dunia Industri;
2. Meningkatkan dan mendukung program padanan dana *multiyears* untuk Program-program MBKM (misal: KedaiReka) dengan sinergy Dunia Usahan dan Dunia Industri;
3. Mempersiapkan data center Dana Abadi Perguruan Tinggi, manajemen *Big Data*, dan *Big Data Analytic* untuk menjadi *dashboard* pimpinan LPDP yang menjadi bagian dari infrastruktur LPDP;
4. Mendorong pembentukan program studi yang high-demand di industri

5. Hibah untuk peningkatan Global Engagement PTN dengan mitra PTN ranking QS100.

d. Kebudayaan

1. Menyusun *Project Management Office* bersifat adhoc untuk pelayanan Dana Abadi Kebudayaan dan bekerja sama dengan Perguruan/Institut Pendidikan Seni, Asosiasi Pekerja dan Penggerak Seni Budaya;
2. Menginisiasi inkubator-inkubator Seni Budaya di daerah-daerah Potensial (Bali, Lombok, Jawa barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku) sebagai bagian dari suprastruktur pendukung SDM dan BUMDES di 10 destinasi wisata unggulan yang dicanangkan pemerintah;
3. Memulai digitalisasi Sejarah Budaya dan mendukung terbentuknya museum-museum sejarah budaya tematik bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Dirjen Budya, Kemenparekraf dan Kemendes (Misalnya : Museum Digital Jalur Rempah Nusantara; Imperium Majapahit dalam versi metaverse; dan lain-lain);
4. Mempersiapkan *data center* Dana Abadi Kebudayaan, manajemen Big Data dan *Big Data Analytic* untuk menjadi *dashboard* pimpinan LPDP yang menjadi bagian dari infrastruktur *Decision Support System* LPDP.

D. RENCANA STRATEGIS BISNIS

1. Kegiatan Layanan Beasiswa 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya jenjang pendidikan sumber daya manusia Indonesia	Jumlah penerima beasiswa S2 dari masyarakat umum	1370	1370	1507	1658	1823
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari masyarakat umum	270	270	297	327	359
		Jumlah penerima beasiswa S2 dari masyarakat umum dengan skema co-funding	30	30	33	36	40
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari masyarakat umum dengan skema co-funding	10	10	11	12	13
		Jumlah penerima beasiswa S2 pada Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia	40	40	44	48	53

		Jumlah penerima beasiswa S3 pada Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia	10	10	11	12	13
		Jumlah penerima beasiswa S2 melalui kerja sama LPDP dan Stuned	10	10	10	10	10
		Jumlah penerima beasiswa S2 melalui kerja sama LPDP dan DAAD	25	25	25	25	25
		Jumlah penerima beasiswa S3 melalui kerja sama LPDP dan DAAD	25	25	25	25	25
		Jumlah penerima beasiswa S2 melalui kerja sama LPDP dan JICA	50	50	50	50	50
		Jumlah penerima beasiswa S2 melalui kerja sama LPDP dan UIII	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah penerima beasiswa S2 melalui kerja sama LPDP dan UIII	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan S3 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis	Jumlah penerima beasiswa S3 untuk tenaga kesehatan di RSPON	30	30	30	30	30
		Jumlah penerima beasiswa pada program Pendidikan Dokter Spesialis sesuai prioritas Kementerian Kesehatan	100	100	110	121	133
3	Meningkatnya jenjang pendidikan sumber daya manusia pada Kementerian/L embaga dan BUMN melalui	Jumlah penerima beasiswa S2 dari kelompok PNS/TNI/POLRI	600	600	660	726	799
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari kelompok PNS/TNI/POLRI	115	115	127	139	153

	pendidikan S2 dan S3	Jumlah penerima beasiswa S2 untuk pegawai BUMN	100	100	100	100	100
		Jumlah penerima beasiswa S3 untuk pegawai BUMN	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya jenjang pendidikan sumber daya manusia dari daerah afirmasi serta kelompok rentan melalui pendidikan S2 dan S3	Jumlah penerima beasiswa S2 dari daerah afirmasi	210	210	231	254	280
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari daerah afirmasi	25	25	28	30	33
		Jumlah penerima beasiswa S2 dari kelompok disabilitas	15	15	17	18	20
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari kelompok disabilitas	5	5	6	6	7
		Jumlah penerima beasiswa S2 dari kelompok masyarakat prasejahtera	500	500	550	605	666
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari kelompok masyarakat prasejahtera	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta program pengayaan/penguatan bahasa	1055	1055	1161	1740	1404
5	Meningkatnya jenjang pendidikan sumber daya manusia pada sektor keagamaan melalui pendidikan S2 dan S3	Jumlah penerima beasiswa S2 untuk santri	220	220	242	266	293
		Jumlah penerima beasiswa S3 untuk santri	80	80	88	97	106
		Jumlah penerima beasiswa S2 untuk kader ulama	85	85	85	85	85
		Jumlah penerima beasiswa S3 untuk kader ulama	15	15	15	15	15
6	Meningkatnya jenjang pendidikan tenaga pendidik di	Jumlah penerima beasiswa S2 bagi tenaga pendidik di bidang kewirausahaan	30	30	33	36	40

	bidang kewirausahaan						
7	Meningkatnya akses pembiayaan pendidikan S2 dan S3 kepada masyarakat melalui kerja sama beasiswa dengan lembaga pemberi beasiswa lainnya	Jumlah nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama LPDP dan Stuned	1	1	-	-	-
		Jumlah nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama LPDP dan DAAD	1	1	1	-	-
		Jumlah nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama LPDP dan JICA	1	1	1	-	-
8	Meningkatnya kesiapan penerima beasiswa dalam melaksanakan studi	Jumlah penerima beasiswa yang mengikuti Program Persiapan Keberangkatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyaluran beasiswa	Jumlah nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama terkait pengelolaan beasiswa dengan Perguruan Tinggi atau mitra strategis lainnya	25	25	30	35	40
		Efisiensi jumlah pembayaran Dana SPP/ <i>tuition fee</i> kepada perguruan tinggi melalui kerja sama	7 M	7 M	8 M	9 M	10 M
		Jumlah pertemuan koordinasi dengan pengelola beasiswa di perguruan tinggi dalam negeri	2	2	2	2	2
		Jumlah pertemuan koordinasi dengan pengelola beasiswa di perguruan tinggi luar negeri	1	1	1	1	1

10	Meningkatnya kapasitas alumni penerima beasiswa dalam melaksanakan kontribusi kepada Indonesia	Jumlah alumni penerima beasiswa yang teresap di dunia kerja	22143	22143	23314	23722	23855
		Jumlah alumni penerima beasiswa yang menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat	2260	2260	2379	2421	2434
		Jumlah kegiatan persiapan (<i>bridging</i>) bagi calon alumni untuk mempersiapkan tantangan pada dunia kerja	7	7	7	7	7

2. Kegiatan Layanan Pendanaan Riset 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya jumlah riset Indonesia	Jumlah Riset Penugasan Dewan Penyantun Program Baru Yang Disalurkan	2 (prog UKICIS, IMPACT)	2	2	2	2
		Jumlah Riset Kerja Sama dgn Mitra (industri/ds b) Yang Disalurkan	3	3	3	3	3
		Jumlah SDM Direktorat Fasilitasi Riset yang tersertifikas i Ahli TKT Madya	6	6	3	3	3
		Jumlah SDM Direktorat Fasilitasi Riset yang tersertifikas i Auditor Teknologi	6	6	3	3	3

		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi eRISPRO	2 (SIPENSEL & Piloting Mobile Apps Dashboard)	1 Mobile Apps eRISPRO (Modul Backoffices)	1 Expand Interoperability & 1 Modul Analytics	Open Platform eRISPRO (research grant managem ent apps for free)	Open Platform eRISPRO (research grant managem ent apps for free)
		Jumlah Riset Kompetisi - UMKM Berbasis Teknologi	1	1	1	1	1

3. Kegiatan Pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan

No	Tujuan/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kapasitas SDM di bidang Kebudayaan	Jumlah Penerima Beasiswa Pelaku Budaya	0	0	50	60	70
		Jumlah Produksi Kegiatan Kebudayaan	0	0	5	5	8
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan	0	0	3	3	3
		Jumlah Produksi Media	0	0	2	2	2

4. Kegiatan Pengelolaan Dana Abadi Perguruan Tinggi

No	Tujuan/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Peringkat Rata-Rata Perguruan Tinggi Indonesia	Jumlah Penerima Padanan Dana Perguruan Tinggi	0	0	16	18	20
		Kenaikan Peringkat Perguruan Tinggi yang mendapatkan dana Padanan	0	0	5	5	5

5. Kegiatan Pengelolaan Dana Abadi Penelitian

No	Tujuan/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengembangan program layanan di bidang penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi	Jumlah Penerima Riset Proyek Riset Nasional	0	0	200	250	270
		Produk Inovasi dan Produk riset Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan	0	0	40	50	60

6. Unit Investasi 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkannya PNB	Penyediaan dukungan operasional investasi penyertaan langsung	kustodian & SOP setelmen equity participation	kustodian & SOP setelmen quasi equity participation (<i>convertible bond</i>)	kustodian & SOP setelmen <i>revenue/profit sharing</i>	kustodian & SOP setelmen jenis investasi langsung lainnya	kustodian & SOP setelmen jenis investasi langsung lainnya
		Penyediaan dukungan operasional investasi valuta asing	kustodian, rek valas, SOP setelmen	rek valas bertambah	rek valas bertambah	rek valas bertambah	rek valas bertambah
		Jumlah pengembang an aplikasi teknologi Informasi dalam pengolahan data investasi	4	3	2	1	1

4

Penutup



BAB IV

PENUTUP

Sejatinya, dokumen revisi ke-2 Rencana Strategi Bisnis (RSB) LPDP tahun 2020-2024 ini menjadi input untuk menyusun program dan kebijakan LPDP yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, BRIN, Kementerian Agama dan *stakeholder* lainnya dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Selain itu, terbitnya Perpres No. 111/2021 tentang Dana Abadi di bidang Pendidikan, menjadi amanah baru bagi LPDP untuk menyusun program dan layanan dalam 4 kelolaan dana abadi yang meliputi: dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi.

Beberapa poin kritis dalam revisi ke-2 RSB LPDP tahun 2020-2024 ini sebagai berikut:

1. LPDP perlu melakukan transformasi dalam konteks tata kelola kelembagaan, pengembangan SDM, IT arsitektur dan strategi pengembangan dana abadi dari sumber lainnya selain APBN.
2. LPDP perlu menyusun berbagai kajian dalam mendukung rencana transformasi dimaksud meliputi:
 - a. Kajian Tata Kelola Kelembagaan yang disesuaikan dengan peran LPDP sebagai BLU penuh dan memberikan dukungan administratif dan pendanaan terhadap arah strategis dan kebijakan Dewan Penyantun LPDP
 - b. Kajian sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung layanan dana abadi LPDP dengan menggunakan Big Data dan AI.
 - c. Pemenuhan kebutuhan SDM LPDP sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi nya selaras dengan Perpres No 111/2021.
 - d. Kajian kebijakan dan regulasi dalam rangka pengembangan dana abadi dari sumber-sumber non APBN yang akuntabel dan harmonis dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - e. Keperluan sarana dan prasarana yang memadai
 - f. Kajian mengenai gambaran yang utuh dan komprehensif terkait kompetensi SDM Unggul Indonesia Emas 2045.
3. LPDP perlu menciptakan budaya dan *mindset* inovatif kepada insan aparatur LPDP sehingga bisa menjadi organisasi yang *agile*, adaptif dan pembelajar.
4. Program layanan dana abadi LPDP diselaraskan dengan berbagai pertimbangan perubahan global, *roadmap* pendidikan nasional, penelitian, untuk mendukung SDM unggul sebagai generasi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2019). Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
- BPPT. (2021). Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- BSN. (2021). Rencana Strategis Tahun 2020-2024: Pusat Riset dan Pengembangan SDM. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Katadata. (2019). Cek Data: Anggaran Riset Indonesia Baru 0,3 Persen PDB. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/17/cek-data-anggaran-riset-indonesia-baru-03-persen-pdb>
- Kemenag. (2020). Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kemendikbud. (2020). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2017). Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2020). Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemenristekdikti. (2019). Prioritas Riset Nasional 2020-2024: Kebijakan Untuk Mendorong Pengembangan dan Pemanfaatan Produksi Dalam Negeri. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Kemenristekdikti. (2017). Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- LPDP. (2022). Laporan Kinerja (LAKIN) 2021. Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- WIPO. (2021). *Global Innovation Index: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis*. Geneva: World Intellectual Property Organization.